ARSIP Jurnal Arsitektur, Vol. 6, No. 2, November 2026: 237 -250

THE WELCOMING CIVIC CENTER: A NEO-VERNACULAR DESIGN STRATEGY FOR THE WEST JAVA INTEGRATED GOVERNMENT COMPLEX
PUSEUR NAGARA YANG SOMEAH: STRATEGI DESAIN NEO-VERNAKULAR UNTUK KAWASAN PEMERINTAHAN TERPADU JAWA BARAT

Maulidah Fazat Husna[1)], Mutiawati Mandaka[2)], Anityas Dian Susanti[3)]
Progarm Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pandanaran[1), 2), 3)]
maulidafzth@gmail.com[1)]
mutia.mandaka@unpand.ac.id[2)]
tyas@unpand.ac.id[3)]

Abstrak

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat menuntut kawasan pemerintahan yang mengintegrasikan fungsi administratif, pelayanan publik, dan representasi pemerintahan. Kawasan eksisting yang berkembang secara terpisah belum optimal dalam integrasi fungsi, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan representasi identitas budaya Sunda. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi desain Neo-Vernakular untuk kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat melalui konsep Puseur Nagara yang Someah. Metode yang digunakan adalah perancangan arsitektur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, pengumpulan data, analisis tapak, aktivitas, kebutuhan ruang, regulasi, dan pengembangan konsep desain. Hasil penelitian menghasilkan empat strategi utama, yaitu integrasi tata massa melalui prinsip centralized government complex, pembentukan hierarki ruang berdasarkan tingkat publik dan privasi, transformasi arsitektur Sunda melalui reinterpretasi atap Julang Ngapak dan filosofi Someah Hade Ka Semah, serta respons terhadap iklim tropis dan lingkungan tapak. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi filosofi budaya Sunda dengan strategi desain Neo-Vernakular pada skala kawasan pemerintahan terpadu. Penelitian ini berkontribusi dalam menghasilkan kerangka strategi desain bagi pengembangan kawasan pemerintahan modern yang fungsional, terintegrasi, responsif terhadap lingkungan, dan beridentitas lokal.
Kata kunci: Puseur Nagara yang Someah, strategi desain, arsitektur Neo-Vernakular, kawasan pemerintahan terpadu, arsitektur Sunda

Abstract

The growing complexity of governance in West Java Province requires a government complex that integrates administrative functions, public services, and governmental representation. The existing government facilities, which have developed separately, have not fully achieved functional integration, coordination among Regional Government Organizations (OPD), or the representation of Sundanese cultural identity. This study aims to formulate a Neo-Vernacular design strategy for an integrated government complex in West Java through the concept of Puseur Nagara yang Someah. The study employs an architectural design method with a descriptive qualitative approach, involving literature reviews, data collection, site analysis, user and activity analysis, space requirements, regulatory analysis, and design concept development. The findings identify four main strategies: spatial and mass integration based on the centralized government complex principle, spatial hierarchy according to levels of public access and privacy, transformation of Sundanese architectural elements through reinterpretation of the Julang Ngapak roof form and the philosophy of Someah Hade Ka Semah, and adaptation to the tropical climate and site context. The novelty lies in integrating Sundanese cultural philosophy into Neo-Vernacular design strategies at the scale of an integrated government complex. This study contributes a design strategy framework for developing modern government complexes that are functional, integrated, environmentally responsive, and rooted in local cultural identity.
Keywords: Puseur Nagara yang Someah, design strategy, Neo-Vernacular architecture, integrated government complex, Sundanese architecture.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan urbanisasi yang tinggi. Perkembangan tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam kebutuhan ruang kerja, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun penyediaan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut tersedianya kawasan pemerintahan yang tidak hanya mampu mewadahi aktivitas administratif, tetapi juga memiliki sistem ruang yang terintegrasi, representatif, mudah diakses, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pemerintahan di masa mendatang.

Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini berada di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung (Yudha & Setiyowati, 2022). Gedung Sate memiliki nilai historis dan arsitektural yang kuat sebagai salah satu identitas Jawa Barat, tetapi perkembangan organisasi pemerintahan dan bertambahnya kebutuhan ruang menyebabkan fungsi pemerintahan tidak seluruhnya terwadahi dalam satu kawasan. Penyebaran kantor-kantor dinas pada lokasi yang berbeda dapat meningkatkan jarak pergerakan antarinstansi dan memengaruhi efektivitas koordinasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kawasan pemerintahan baru yang mampu mengintegrasikan fungsi administratif, pelayanan publik, dan fungsi representatif dalam satu kawasan terpadu (detikjabar, 2023).

Wacana relokasi Kantor Gubernur Jawa Barat menjadi salah satu strategi pengembangan kawasan pemerintahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masa depan (BBC NEWS INDONESIA, 2019). Dalam konteks perancangan kawasan pemerintahan, government complex tidak hanya dipahami sebagai kumpulan bangunan perkantoran, tetapi sebagai suatu sistem ruang yang mengatur hubungan antara fungsi administratif, pelayanan publik, representasi pemerintahan, sirkulasi, ruang terbuka, dan hubungan antarinstansi. Penelitian mengenai enam pusat pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa konfigurasi geometris dan tata ruang kawasan memiliki keterkaitan dengan struktur jaringan jalan dan tingkat keterpusatan kawasan pemerintahan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan spasial dan urban dalam merancang pusat pemerintahan, bukan hanya pendekatan terhadap bentuk bangunan individual.

Dalam perancangan ini diterapkan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular sebagai konsep utama desain yang memungkinkan nilai, karakter, dan elemen arsitektur tradisional Sunda ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektur modern tanpa kehilangan identitas lokal. Pendekatan tersebut menggabungkan prinsip arsitektur modern dengan nilai-nilai arsitektur tradisional Sunda sehingga mampu menghasilkan bangunan yang tetap relevan terhadap perkembangan teknologi namun tidak kehilangan identitas lokal (Fajrine et al., 2017). Arsitektur Neo-Vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. “Pada intinya arisitektur Neo-Vernakular merupakan perpaduan antara bangunan modern dengan bangunan bata pada abad 19” (Lintong et al., 2019). Penerapan konsep Neo-Vernakular diwujudkan melalui transformasi bentuk arsitektur tradisional Sunda, penggunaan filosofi budaya lokal, pengolahan massa bangunan, pemanfaatan ruang terbuka hijau, serta penerapan prinsip arsitektur tropis yang sesuai dengan karakter iklim Jawa Barat. Dengan demikian, kawasan pemerintahan yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi representasi budaya dan identitas Provinsi Jawa Barat.

Perancangan ini bertujuan menghasilkan desain relokasi Kantor Gubernur Jawa Barat yang mampu mengintegrasikan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan ruang representatif dalam satu kawasan terpadu melalui pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular. Selain meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, hasil perancangan diharapkan mampu menjadi landmark baru yang merepresentasikan karakter budaya Sunda serta mendukung pengembangan kawasan pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ruang lingkup perancangan dibatasi pada kawasan seluas ±22 hektar di Tegalluar, Kota Bandung, dengan fokus pada pengolahan tapak, tata massa kawasan, bangunan utama pemerintahan, serta penerapan

prinsip-prinsip Arsitektur Neo-Vernakular Sunda sesuai regulasi tata ruang yang berlaku.

Pendekatan Neo-Vernakular memiliki relevansi khusus dalam konteks tersebut karena memungkinkan elemen arsitektur tradisional ditransformasikan ke dalam kebutuhan arsitektur kontemporer. Dalam konteks bangunan pemerintahan, pendekatan ini telah diterapkan untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus memenuhi kebutuhan fungsi modern. Penelitian terbaru mengenai Neo-Vernakular juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penggunaan bentuk tradisional, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan nilai budaya, fungsi modern, konteks lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai *government complex*, Arsitektur Neo-Vernakular, dan identitas budaya telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam penerapan nilai filosofis budaya Sunda sebagai strategi desain pada skala kawasan pemerintahan terpadu. Penelitian terdahulu mengenai Arsitektur Neo-Vernakular umumnya berfokus pada transformasi bentuk, elemen arsitektur, dan identitas visual pada skala bangunan, sementara kajian mengenai penerapan nilai budaya sebagai dasar pembentukan sistem spasial kawasan pemerintahan masih terbatas. Di sisi lain, penelitian mengenai *government complex* lebih banyak menekankan aspek fungsional, keterpusatan kawasan, hubungan antarbangunan, dan efisiensi sirkulasi tanpa mengintegrasikan nilai filosofis lokal secara mendalam sebagai dasar strategi desain. Dengan demikian, masih terbatas penelitian yang secara simultan menghubungkan hierarki ruang pemerintahan, integrasi antar-OPD, tata massa kawasan, ruang publik, serta reinterpretasi nilai dan elemen budaya Sunda dalam satu strategi desain Neo-Vernakular pada skala kawasan pemerintahan terpadu.

Research gap tersebut menjadi dasar pengembangan konsep **"Puseur Nagara yang Someah"** dalam penelitian ini. Konsep tersebut menggabungkan gagasan Puseur Nagara sebagai pusat pemerintahan dengan nilai Someah Hade Ka Semah sebagai prinsip keramahan dan keterbukaan terhadap masyarakat. Konsep tersebut dikembangkan untuk membentuk kawasan pemerintahan yang memiliki hierarki dan pusat orientasi yang jelas, tetapi tetap terbuka, humanis, dan merepresentasikan karakter budaya Sunda. Dalam rancangan, gagasan tersebut diterjemahkan melalui pemusatan fungsi pemerintahan, pengelompokan zona berdasarkan tingkat akses dan privasi, hubungan antarbangunan, ruang publik, serta transformasi elemen arsitektur Sunda. Konsep Puseur Nagara yang Someah sebelumnya telah menjadi dasar konseptual dalam perancangan kawasan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana merumuskan strategi desain Neo-Vernakular yang mampu mengintegrasikan kebutuhan fungsional dan spasial kawasan pemerintahan terpadu dengan identitas budaya Sunda dalam perencanaan kawasan pemerintahan Jawa Barat? Rumusan masalah tersebut mencakup bagaimana mengintegrasikan fungsi pemerintahan dalam satu sistem kawasan, bagaimana menerapkan hierarki ruang berdasarkan karakter pengguna, serta bagaimana mentransformasikan nilai dan elemen arsitektur Sunda ke dalam arsitektur pemerintahan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi desain Neo-Vernakular bagi kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat melalui konsep "Puseur Nagara yang Someah". Strategi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi administratif, pelayanan publik, representasi pemerintahan, sistem tata massa, hierarki ruang, serta identitas budaya Sunda dalam suatu kesatuan kawasan. Proses perancangan dilakukan melalui analisis fungsi, pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, regulasi, karakteristik tapak, serta konteks sosial dan budaya sebagai dasar pembentukan konsep dan strategi desain. Pendekatan metodologis tersebut telah digunakan dalam perancangan kawasan pada penelitian ini melalui metode deskriptif kualitatif dan analisis arsitektur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada **perumusan "Puseur Nagara yang Someah" sebagai strategi desain Neo-Vernakular pada skala kawasan pemerintahan**, bukan hanya sebagai pendekatan bentuk bangunan. Strategi tersebut menghubungkan empat aspek utama, yaitu **integrasi tata massa pemerintahan, pembentukan hierarki ruang publik hingga privat, transformasi nilai dan elemen arsitektur Sunda, serta respons terhadap**

konteks lingkungan dan iklim tropis. Dengan demikian, Neo-Vernakular ditempatkan sebagai strategi pembentukan sistem kawasan yang menghubungkan fungsi, ruang, budaya, dan lingkungan.

Kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu arsitektur adalah memberikan suatu kerangka konseptual dan desain mengenai bagaimana identitas budaya lokal dapat diterjemahkan ke dalam sistem ruang kawasan pemerintahan modern. Strategi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan desain government complex yang tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga memiliki identitas lokal, keterhubungan ruang, karakter publik yang humanis, dan relevansi terhadap konteks budaya serta lingkungan setempat.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur Neo-Vernakular merupakan pendekatan arsitektur yang mengadaptasi nilai, prinsip, karakter, dan elemen arsitektur tradisional ke dalam konteks arsitektur modern. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meniru bentuk tradisional secara literal, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap bentuk, ruang, material, simbol, serta prinsip lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan fungsi dan teknologi masa kini (R Jeremiah, 2024). Dengan demikian, penerapan Neo-Vernakular menempatkan budaya lokal sebagai sumber konsep yang ditransformasikan menjadi strategi desain kontemporer.

Dalam penelitian ini, Neo-Vernakular diposisikan bukan hanya sebagai pendekatan visual bangunan, tetapi sebagai dasar pembentukan karakter kawasan pemerintahan. Prinsip tersebut diterapkan melalui tiga lapisan transformasi, yaitu transformasi nilai budaya, transformasi elemen arsitektur, dan transformasi prinsip lingkungan. Transformasi nilai budaya digunakan untuk membentuk karakter hubungan antar ruang dan pengguna, transformasi elemen arsitektur digunakan untuk membentuk identitas visual kawasan, sedangkan transformasi prinsip lingkungan digunakan untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kondisi iklim tropis.



Gambar 1. Atap Julang Ngapak
Sumber : Agus Warsudi (2023)

Dengan pendekatan tersebut, Neo-Vernakular menjadi penghubung antara kebutuhan pemerintahan modern dengan identitas lokal Jawa Barat. Hal ini penting karena kawasan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas administratif, tetapi juga memiliki fungsi representatif sebagai simbol institusi dan identitas daerah.

2.2. Identitas Budaya dalam Arsitektur

Identitas budaya dalam arsitektur berkaitan dengan kemampuan suatu lingkungan binaan dalam merepresentasikan karakter, nilai, dan sejarah masyarakat yang membentuknya. Identitas tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan bentuk atau ornamen tradisional, tetapi dapat diterjemahkan melalui konfigurasi ruang, hubungan bangunan dengan lingkungan, material, pola sirkulasi, serta simbol yang memiliki makna bagi masyarakat.

Dalam konteks Jawa Barat, identitas budaya yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karakter arsitektur dan nilai budaya Sunda. Arsitektur Sunda memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi lingkungan, iklim tropis, keterbukaan ruang, kesederhanaan bentuk, serta nilai kebersamaan. Karakter tersebut menjadi dasar untuk membentuk lingkungan pemerintahan yang tidak hanya formal, tetapi juga terbuka dan humanis.

Identitas budaya kemudian diterjemahkan melalui konsep **"Puseur Nagara yang Someah"**. *Puseur Nagara* dimaknai sebagai pusat pemerintahan yang menjadi titik orientasi kawasan, sedangkan Someah Hade Ka Semah merepresentasikan nilai keramahan, keterbukaan, dan penerimaan terhadap masyarakat. Sintesis kedua nilai tersebut menghasilkan prinsip bahwa pusat pemerintahan harus memiliki hierarki dan

kewibawaan sebagai pusat administrasi, tetapi tetap memiliki karakter ruang yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

2.3. Desain Kawasan Pemerintahan

Kawasan pemerintahan merupakan lingkungan binaan yang terdiri atas berbagai fungsi administratif, pelayanan publik, representasi pemerintahan, serta fasilitas pendukung yang saling berhubungan. Oleh karena itu, desain kawasan pemerintahan perlu mempertimbangkan hubungan antarbangunan, hierarki ruang, aksesibilitas, keamanan, sirkulasi, ruang publik, dan orientasi kawasan.

Dalam penelitian ini, prinsip desain kawasan pemerintahan diterapkan melalui konsep *centralized government complex*, yaitu menempatkan bangunan Kantor Gubernur sebagai pusat orientasi kawasan dan mengorganisasikan bangunan pemerintahan lainnya berdasarkan hubungan fungsional dan hierarki ruang. Konsep tersebut telah diterapkan pada rancangan melalui penempatan bangunan utama sebagai pusat dan bangunan dinas di sekelilingnya.

Prinsip kawasan pemerintahan kemudian disintesiskan dengan nilai Puseur Nagara. Pusat kawasan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi pusat orientasi simbolik kawasan. Dari prinsip tersebut diperoleh beberapa parameter desain, yaitu:

a. hierarki kawasan, dengan bangunan pusat pemerintahan sebagai orientasi utama;
b. integrasi fungsi, melalui pengelompokan fungsi pemerintahan berdasarkan hubungan aktivitas;
c. hierarki akses, melalui pembagian zona publik, semi privat, dan privat;
d. keterhubungan ruang, melalui sistem sirkulasi yang menghubungkan fungsi-fungsi pemerintahan;
e. ruang publik representatif, sebagai area interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, teori desain kawasan pemerintahan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tata massa, zonasi, sirkulasi, hubungan antarbangunan, dan ruang terbuka kawasan.

2.4.Simbolisme Arsitektur dan Transformasi Julang Ngapak

Simbolisme arsitektur merupakan penggunaan bentuk, elemen, atau konfigurasi ruang yang memiliki makna tertentu sehingga bangunan dapat menyampaikan identitas dan nilai yang ingin direpresentasikan. Dalam pendekatan Neo-Vernakular, simbol tidak harus dipertahankan dalam bentuk aslinya, tetapi dapat ditransformasikan melalui abstraksi geometris, proporsi, komposisi, material, dan hubungan dengan ruang.

Salah satu elemen arsitektur Sunda yang digunakan dalam penelitian ini adalah atap Julang Ngapak. Bentuk atap tersebut menjadi salah satu karakter arsitektur tradisional Sunda dan digunakan sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan karakter bangunan.

Penerapan Julang Ngapak dalam penelitian tidak dilakukan melalui penyalinan bentuk rumah tradisional secara langsung. Bentuk atap ditransformasikan menjadi geometri arsitektur kontemporer yang tetap mempertahankan karakter visual utamanya. Dengan demikian, Julang Ngapak berfungsi sebagai simbol identitas, sedangkan kebutuhan fungsi, struktur, skala bangunan, dan teknologi tetap mengikuti kebutuhan bangunan pemerintahan modern.

Transformasi tersebut menghasilkan hubungan:
Julang Ngapak → karakter bentuk → abstraksi geometri → elemen atap/fasad → identitas bangunan pemerintahan.

Parameter ini digunakan untuk menganalisis bentuk massa, bentuk atap, fasad, proporsi, dan elemen visual bangunan.

2.5. Sintesis Teori dan Parameter Desain

Berdasarkan kajian mengenai Arsitektur Neo-Vernakular, identitas budaya, desain kawasan pemerintahan, serta simbolisme dan transformasi arsitektur Sunda, dapat disusun sintesis teori sebagai dasar dalam merumuskan strategi desain kawasan. Sintesis dilakukan dengan menghubungkan nilai budaya Sunda sebagai sumber nilai, prinsip Arsitektur Neo-Vernakular sebagai pendekatan transformasi, parameter desain sebagai aspek yang dapat diterapkan secara arsitektural, serta strategi kawasan sebagai bentuk penerapan pada skala kawasan pemerintahan.

Nilai budaya Sunda yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Puseur Nagara, Someah Hade Ka Semah, dan prinsip kebersamaan (Ngariung). Nilai tersebut kemudian diterjemahkan melalui prinsip Arsitektur Neo-Vernakular yang menekankan reinterpretasi nilai budaya, transformasi elemen arsitektur, dan adaptasi terhadap konteks lingkungan. Proses tersebut menghasilkan parameter desain berupa hierarki kawasan, integrasi fungsi, hierarki akses, keterhubungan ruang, ruang publik representatif, transformasi bentuk arsitektur Sunda, serta respons terhadap iklim tropis.

Pada skala kawasan pemerintahan, parameter tersebut diterapkan melalui strategi pemusatan fungsi pemerintahan, pengelompokan massa berdasarkan hubungan fungsional, pembagian zona publik hingga privat, pembentukan ruang publik sebagai ruang interaksi pemerintah dan masyarakat, serta pengolahan elemen arsitektur Sunda secara kontemporer. Pada skala bangunan, strategi tersebut diterjemahkan melalui komposisi massa, bentuk atap, fasad, proporsi, material, dan elemen visual. Salah satu bentuk transformasi yang digunakan adalah reinterpretasi atap Julang Ngapak dari bentuk tradisional menjadi geometri arsitektur kontemporer tanpa melakukan reproduksi bentuk secara literal.

Dengan demikian, sintesis teori dalam penelitian ini membentuk hubungan berjenjang antara **nilai budaya Sunda → prinsip Neo-Vernakular → parameter desain → strategi kawasan → bentuk arsitektur.** Hubungan tersebut menjadi dasar dalam proses analisis dan pengembangan konsep Puseur Nagara yang Someah sebagai strategi desain kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat.

Tabel 1. Sintesis Teori

Tahap	Isi
Nilai Budaya Sunda	*Puseur Nagara* • *Someah Hade Ka Semah* • *Ngariung*
Prinsip Neo-Vernakular	Reinterpretasi nilai budaya • Transformasi elemen arsitektur • Adaptasi lingkungan
Parameter Desain	Hierarki kawasan • Integrasi fungsi • Hierarki akses • Keterhubungan ruang • Ruang publik • Transformasi bentuk • Respons iklim
Strategi Kawasan	*Centralized government complex* • Zonasi publik–semi privat–privat • Massa mengelilingi pusat • Ruang publik representatif • Sirkulasi terintegrasi • Ruang terbuka responsif
Bentuk Arsitektur	Massa terpusat • Atap *Julang Ngapak* tertransformasi • Fasad kontemporer • Material lokal • Ruang terbuka • Karakter humanis

Sumber: Analisis Penulis, 2026

3. METODOLOGI PERANCANGAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis arsitektur yang diarahkan pada perumusan strategi desain Neo-Vernakular untuk kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan kondisi tapak, kebutuhan fungsi pemerintahan, karakter pengguna, kebutuhan ruang, konteks lingkungan, serta nilai budaya Sunda yang menjadi dasar pengembangan desain. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, identifikasi objek dan unit analisis, analisis data, sintesis parameter desain, dan perumusan strategi desain.

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

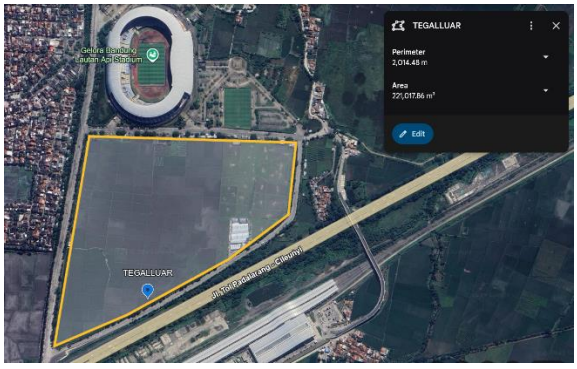
Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan dokumentasi kondisi eksisting tapak perencanaan di kawasan Tegalluar, Kota Bandung. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fisik tapak, aksesibilitas, orientasi, vegetasi, kondisi lingkungan, serta potensi dan kendala tapak. Dokumentasi digunakan untuk merekam kondisi eksisting sebagai bahan pendukung dalam proses analisis.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen regulasi, standar perancangan, serta studi preseden yang relevan dengan kawasan pemerintahan, Arsitektur Neo-Vernakular, dan arsitektur Sunda. Literatur digunakan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai prinsip Neo-Vernakular, identitas budaya, simbolisme arsitektur, nilai budaya Sunda, serta prinsip perancangan kawasan pemerintahan. Regulasi dan standar digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan dan persyaratan ruang.

3.2. Data Site dan Aspek Analisis

Data penelitian berupa kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat pada tapak perencanaan seluas ±221.017,86 m² atau ±22 hektar di kawasan Tegalluar. Aspek analisis dibagi menjadi beberapa, yaitu: (1) kondisi dan karakteristik tapak; (2) pengguna dan aktivitas pemerintahan; (3) kebutuhan dan hubungan ruang; (4) regulasi dan standar perancangan; (5) identitas dan nilai budaya Sunda; serta (6) kondisi iklim dan lingkungan.

Pembagian aspek analisis tersebut digunakan untuk menghubungkan kebutuhan fungsional kawasan dengan prinsip Arsitektur Neo-Vernakular sehingga hasil analisis tidak hanya menghasilkan kebutuhan ruang, tetapi juga parameter yang dapat diterapkan pada tata massa, zonasi, sirkulasi, ruang publik, bentuk bangunan, dan respons lingkungan.



Gambar 2. Lokasi perancangan
Sumber: Google Maps, 2026

Lokasi : Jl. Sor GBLA, Rancanumpang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
Titik Koordinasi : 6°57'47"S 107°42'43"E
Luas Lahan : ± 221.017,86m² (± 22 ha)
Batasan Tapak :
Utara : Stadion GBLA
Selatan : Jl. H. Dada Rosada
Timur : Jl. Sor GBLA
Barat : Jl. Sor GBLA

Kondisi Lahan dan Potensi Lingkungan:

a. Lokasi strategis untuk pemerintahan yang terhubung dengan transportasi modern.
b. Dekat dengan Sungai Citarik (±400 m di selatan) dan anak sungai kecil di barat daya tapak.
c. Akses sekunder dari arah Tol Soroja (Gerbang Buah Batu) ±10 menit dan Stasiun KCIC Tegalluar ±1 km.
d. Lahan didominasi sawah produktif dan semak belukar.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif sesuai dengan karakter data yang diperoleh. Analisis tapak digunakan untuk mengidentifikasi kondisi matahari, angin, iklim, aksesibilitas, view, vegetasi, utilitas, orientasi, kontur, serta hubungan tapak dengan lingkungan sekitar. Hasil analisis digunakan untuk menentukan parameter orientasi bangunan, zonasi, tata massa, sirkulasi, ruang terbuka, dan respons lingkungan.

Analisis pelaku dan aktivitas digunakan untuk mengidentifikasi karakter pengguna, jenis aktivitas, kebutuhan akses, serta tingkat privasi. Data tersebut dianalisis untuk menentukan hubungan aktivitas dan kebutuhan zonasi kawasan. Analisis kebutuhan ruang dilakukan dengan mengacu pada regulasi, standar perancangan, literatur, dan hasil analisis aktivitas untuk menghasilkan program ruang dan besaran ruang.

Analisis identitas budaya dilakukan melalui studi literatur dan studi preseden terhadap nilai dan elemen arsitektur Sunda. Nilai *Puseur Nagara*, *Someah Hade Ka Semah*, dan *Ngariung* diinterpretasikan menjadi prinsip desain, sedangkan elemen *Julang Ngapak* dianalisis melalui proses reinterpretasi bentuk. Hasil analisis kemudian diterjemahkan menjadi parameter desain yang dapat diterapkan pada skala kawasan maupun bangunan.

Seluruh hasil analisis kemudian disintesiskan untuk memperoleh hubungan antara nilai budaya Sunda, prinsip Neo-Vernakular, parameter desain, strategi kawasan, dan bentuk arsitektur. Sintesis tersebut menjadi dasar perumusan konsep **"Puseur Nagara yang Someah"** sebagai strategi desain Neo-Vernakular kawasan pemerintahan terpadu Jawa Barat.

3.4. Pendekatan Pelaku Kegiatan

Pendekatan pelaku kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh pengguna kawasan beserta karakteristik aktivitasnya. Pelaku kegiatan meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pegawai administrasi, petugas operasional, tamu kedinasan, masyarakat umum, hingga penyedia layanan pendukung. Analisis ini

menghasilkan pola hubungan pengguna, tingkat privasi, kebutuhan akses, serta sirkulasi yang menjadi dasar penyusunan tata ruang kawasan.

Tabel 2. Aktivitas Pengguna

Pelaku	Aktivitas	Kebutuhan Ruang	Zoning
Gubernur	Datang	Parkir VIP	Privat
	Memimpin rapat pimpinan dan rapat koordinasi antar dinas	Ruang Rapat Utama	Privat
	Menerima tamu penting (pejabat, tamu negara, investor, masyarakat)	Ruang Tamu VIP	Privat
	Menandatangani dokumen penting pemerintahan	Ruang Kerja Gubernur	Privat
	Menyampaikan pidato, konferensi pers, dan kegiatan representatif	Ruang Konferensi Pers	Privat
Wakil Gubernur	**Datang**	**Parkir VIP**	**Privat**
	Menandatangani dokumen penting pemerintahan	Ruang Kerja Wakil Gubernur	Privat
	Mengkoordinasikan kegiatan antar dinas	Ruang Rapat	Privat
	Menerima delegasi atau tamu tingkat menengah	Ruang Tamu	Privat
Tamu Resmi / Delegasi Daerah / Negara	**Datang**	**Parkir VIP**	**Privat**
	Pertemuan resmi dengan gubernur	Ruang Tamu VIP	Privat
	Kunjungan kerja, atau kerja sama antar daerah	Ruang Rapat	Privat
Staff Keuangan dan Kepegawaian	**Datang**	**Parkir Staff**	**Semi Privat**
	Pengelolaan keuangan, honorarium, dan administrasi pegawai	Ruang Kerja Khusus	Privat
	Istirahat	Kantin	Servis
	Ibadah	Musolla	Publik
Staf Pelayanan Publik	**Datang**	**Parkir Staff**	**Semi Privat**
	Menerima masyarakat yang berkonsultasi atau mengajukan permohonan informasi	Ruang Pelayanan Publik, Lobby	Publik
	Istirahat	Kantin	Servis
	Ibadah	Musolla	Publik
	Datang	Parkir	Semi Privat

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 2, aktivitas pengguna kawasan pemerintahan memiliki karakter dan tingkat akses berbeda, meliputi pelayanan publik, administrasi, pimpinan daerah, serta operasional dan pelayanan pendukung. Perbedaan tersebut menjadi dasar pengaturan hierarki ruang publik, semi privat, dan privat. Aktivitas pelayanan masyarakat ditempatkan pada zona publik, aktivitas administrasi dan pimpinan pada zona semi privat hingga privat, sedangkan aktivitas operasional pada zona servis dengan akses terpisah. Hasil analisis menjadi dasar penentuan zoning dan hubungan sirkulasi antarpengguna.

3.4. Pendekatan Aktivitas dan Kebutuhan Ruang

Pendekatan aktivitas dilakukan untuk mengidentifikasi rangkaian kegiatan yang berlangsung pada setiap fungsi pemerintahan sehingga diperoleh kebutuhan ruang yang sesuai dengan standar perencanaan. Penentuan besaran ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Data Arsitek (Neufert), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024, serta hasil analisis perancang. Dari pendekatan ini diperoleh program ruang yang mencakup bangunan inti pemerintahan, kantor dinas, kantor biro, fasilitas pelayanan publik, ruang representatif, dan fasilitas penunjang operasional.

Tabel 3. Program ruang bangunan pemerintah

RUANG GUBERNUR						
Nama Ruang	**Kapasitas**	**Standar (m^2/org)**	**Sumber**	**Luasan (m^2)**	**Sirkulasi 30%**	**Total (m^2)**
Ruang Kerja Gubernur	1	50	PMDG	50	15	65
Ruang Tamu	15	2	PMDG	30	9	39
Ruang Rapat	20	2	PMDG	40	12	52
Toilet	1	8	PMDG	8	2,4	10,4
Ruang Ajudan & Staff Khusus	5	5	PMDG	25	7,5	32,5
SUB TOTAL						**198,9**
RUANG WAKIL GUBERNUR						
Nama Ruang	**Kapasitas**	**Standar (m^2/org)**	**Sumber**	**Luasan (m^2)**	**Sirkulasi 30%**	**Total (m^2)**
Ruang Kerja Gubernur	1	30	PMDG	30	9	39
Ruang Tamu	10	2	PMDG	20	6	26
Ruang Rapat	20	2	PMDG	40	12	52
Toilet	1	6	PMDG	6	1,8	7,8
Ruang Ajudan & Staff Khusus	4	5	PMDG	20	6	26
SUB TOTAL						**150,8**

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 3, program ruang bangunan pemerintahan menunjukkan kebutuhan ruang yang terbentuk dari perbedaan fungsi, pengguna, serta tingkat aktivitas masing-masing bangunan. Ruang dengan fungsi administrasi dan pelayanan membutuhkan keterhubungan yang lebih tinggi dengan ruang pendukung, sedangkan ruang pimpinan dan ruang dengan kebutuhan keamanan tertentu memerlukan tingkat privasi yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi dasar dalam

menentukan hubungan antar ruang, pembagian zona, serta pola sirkulasi di dalam bangunan. Dengan demikian, program ruang tidak hanya digunakan untuk menentukan besaran ruang, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk organisasi ruang yang sesuai dengan hierarki akses pengguna.

Tabel 4. Program ruang bangunan dinas

RUANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
Nama Ruang	**Kapasitas**	**Standar (m^2/org)**	**Sumber**	**Luasan (m^2)**	**Sirkulasi 30%**	**Total (m^2)**
Ruang Kepala Dinas	1	20	PMDG	20	6	26
Ruang Sekretaris Dinas	1	15	PMDG	15	4,5	19,5
Ruang Tamu Kepala Dinas	6	2	DA	12	3,6	15,6
Subbag Umum & Kepegawaian	10	6	PMDG	60	18	78
Subbag Keuangan	8	6	PMDG	48	14,4	62,4
Subbag Program & Pelaporan	8	6	PMDG	48	14,4	62,4
Ruang Rapat Besar	30	2	DA	60	18	78
Ruang Rapat Kecil	20	2	DA	80 x 2 = 160	24 x 2 = 48	208
Lobby & Ruang Tunggu	30	1,2	DA	40	12	52
Loket Pelayanan	6	4	PMDG	25	7,5	32,5
Ruang Arsip	2	30	AP	60	18	78
Ruang Server	2	15	AP	15	4,5	19,5
Pantry Pegawai	2	12	DA	12	3,6	15,6
Toilet Pria	1	3	DA	3 x 2 unit	1,8	7,8
Toilet Wanita	1	3	DA	3 x 2 unit	1,8	7,8
SUB TOTAL						**763,1**

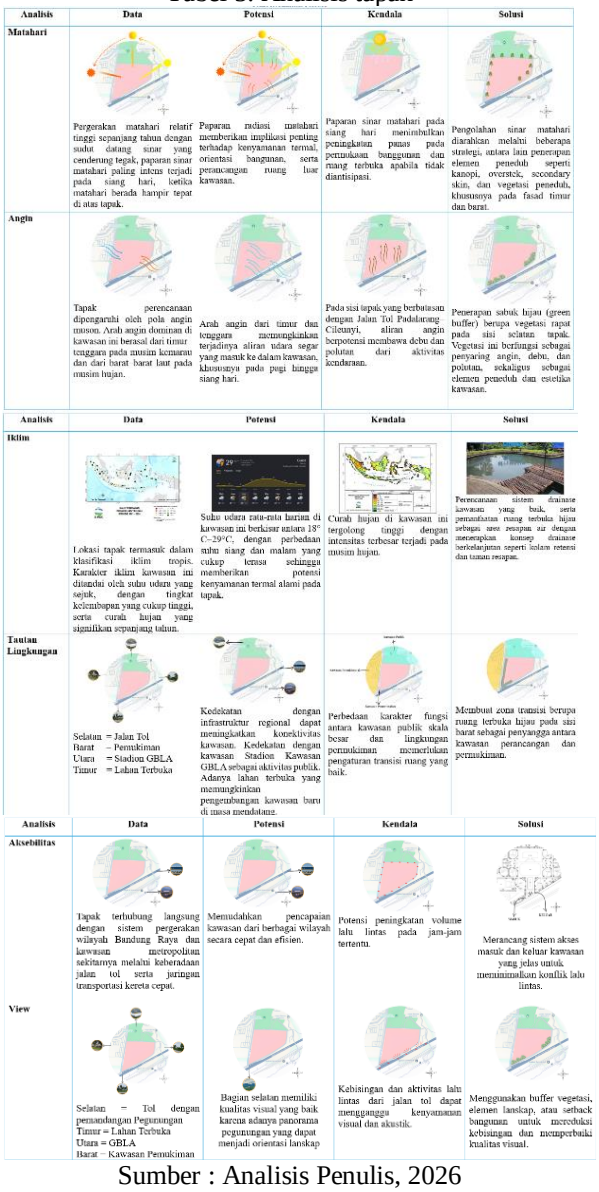
Sumber : Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4, kebutuhan ruang pada bangunan dinas menunjukkan adanya variasi fungsi administrasi, pelayanan, koordinasi, dan ruang pendukung operasional. Kesamaan karakter aktivitas digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan fungsi yang memiliki hubungan kerja dan kebutuhan akses yang berdekatan. Pengelompokan tersebut kemudian diterapkan dalam penyusunan massa bangunan dinas dan hubungan antarbangunan pada skala kawasan. Dengan pendekatan tersebut, penempatan bangunan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan luas ruang, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi hubungan kerja, kemudahan koordinasi antar-OPD, serta tingkat aksesibilitas bagi masyarakat.

3.5. Pendekatan Aspek Kontekstual

Pendekatan kontekstual dilakukan melalui analisis karakteristik tapak yang meliputi kondisi matahari, angin, iklim, tautan lingkungan, aksebilitas, *view*, utilitas, vegetasi, orientasi tapak, dan kontur. Selain kondisi fisik, analisis juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Jawa Barat sebagai dasar penerapan konsep Arsitektur Neo-Vernakular. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam penentuan orientasi bangunan, pembagian zonasi, tata massa kawasan, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang mampu merespons kondisi lingkungan secara optimal.

Tabel 5. Analisis tapak



Sumber : Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 4, kondisi tapak menunjukkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan kawasan,

terutama orientasi matahari, arah angin, aksesibilitas, kebisingan, vegetasi, *view*, dan kondisi kontur. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata massa perlu mempertimbangkan orientasi bangunan terhadap paparan matahari serta arah pergerakan angin untuk meningkatkan kenyamanan termal. Area yang berpotensi menerima kebisingan dan polusi dari jaringan jalan diarahkan untuk memperoleh fungsi buffer melalui vegetasi dan ruang terbuka. Sementara itu, akses utama dan orientasi kawasan digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi zona publik dan pusat orientasi kawasan. Hasil analisis tapak selanjutnya disintesiskan dengan kebutuhan fungsi dan nilai budaya Sunda untuk membentuk tata massa, zoning, sirkulasi, serta ruang terbuka kawasan.

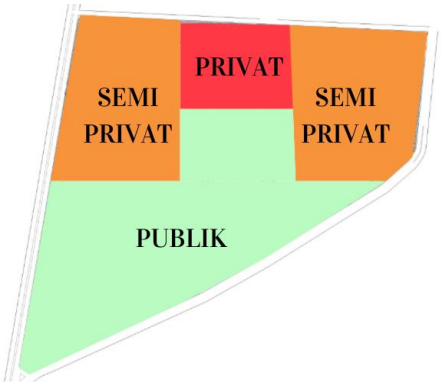
4. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Analisis Perancangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan akan relokasi Kantor Gubernur Jawa Barat didasarkan pada semakin meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, bertambahnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi kawasan pemerintahan eksisting belum mampu mengakomodasi kebutuhan ruang secara optimal sehingga diperlukan kawasan pemerintahan baru yang memiliki kapasitas pengembangan lebih luas, sistem sirkulasi yang lebih baik, dan mampu mengintegrasikan seluruh fungsi pemerintahan dalam satu kawasan.

Berdasarkan hasil analisis tapak, lokasi perancangan di kawasan Tegalluar memiliki potensi yang mendukung sebagai pusat pemerintahan baru karena memiliki luas lahan yang memadai, aksesibilitas yang baik, serta peluang pengembangan kawasan dalam jangka panjang. Analisis terhadap orientasi matahari, arah angin, kebisingan, pencapaian kawasan, vegetasi, dan kondisi eksisting menjadi dasar dalam menentukan orientasi bangunan, pembagian zonasi, serta konsep ruang terbuka hijau yang responsif terhadap kondisi iklim tropis.

Analisis pelaku kegiatan menunjukkan bahwa kawasan akan digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, yaitu pimpinan daerah, aparatur sipil negara, pegawai administrasi, masyarakat umum, tamu kedinasan, serta petugas operasional. Perbedaan karakter aktivitas tersebut menghasilkan kebutuhan tingkat privasi yang berbeda sehingga kawasan dibagi menjadi zona publik, semi privat, dan privat. Pembagian zona ini bertujuan meningkatkan efisiensi pergerakan pengguna sekaligus menjaga keamanan kawasan pemerintahan.



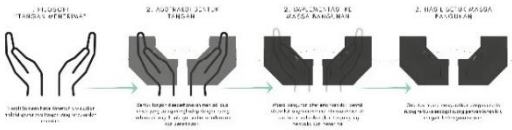
Gambar 3. Zonasi Kawasan
Sumber : Analisis Pribadi, 2026

4.2. Konsep Perancangan

Konsep pada perancangan mengusung pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular sebagai upaya menghadirkan identitas budaya Sunda dalam bangunan pemerintahan modern. Pendekatan ini diterapkan melalui transformasi bentuk arsitektur tradisional Sunda ke dalam komposisi massa bangunan, bentuk atap, elemen fasad, pola ruang, serta penggunaan material yang mencerminkan karakter lokal tanpa mengesampingkan kebutuhan fungsi bangunan pemerintahan masa kini.

Konsep utama yang diangkat adalah “Puseur Nagara yang Someah”, yaitu perpaduan antara filosofi pusat pemerintahan sebagai inti kekuasaan dengan nilai keramahan dan keterbukaan terhadap masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penataan ruang yang berlapis dari plaza publik hingga bangunan inti, serta pola massa yang mengelilingi pusat sebagai bentuk kebersamaan. Dengan demikian, kawasan ini tidak hanya formal, tetapi juga humanis dan mencerminkan nilai budaya Sunda. Konsep ini menggabungkan dua nilai utama dalam budaya Sunda, yaitu:

a. Puseur Nagara, adalah frasa bahasa Sunda yang berarti pusat negara atau pusat pemerintahan (Suharso & Ibid, 2020), yang menempatkan pusat pemerintahan sebagai titik keseimbangan kawasan.
b. Someah Hade Ka Semah, adalah filosofi budaya Sunda yang berarti selalu ramah, bersikap baik, menjaga, dan menjamu setiap tamu atau pendatang (Ardiyansyah et al., 2021).



Gambar 4. Transformasi massa bangunan
Sumber : Analisis Penulis, 2026

c. Atap Julang Ngapak, mengadaptasi bentuk atap julang ngapak sebagai identitas utama bangunan yang ditransformasikan menjadi geometri modern tanpa menghilangkan karakter rumah adat sunda.



Gambar 5. Filosofi bentuk atap
Sumber: (Dhani, 2020)



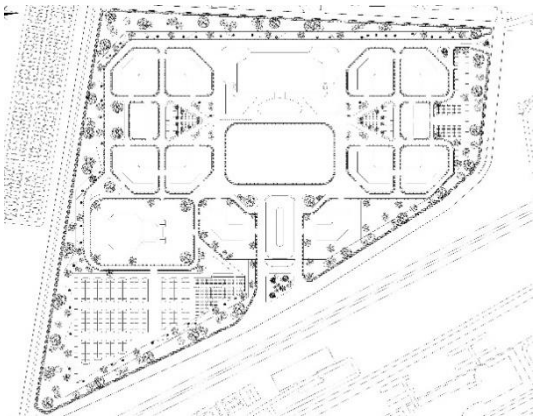
Gambar 6 Penerapan atap julang ngapak ke bangunan
Sumber : Analisis Penulis, 2026

d. Ngariung (Kebersamaan), Konsep ini diterapkan melalui pola massa bangunan yang mengelilingi pusat kawasan, sehingga menciptakan hubungan yang saling terhubung antar fungsi pemerintahan.

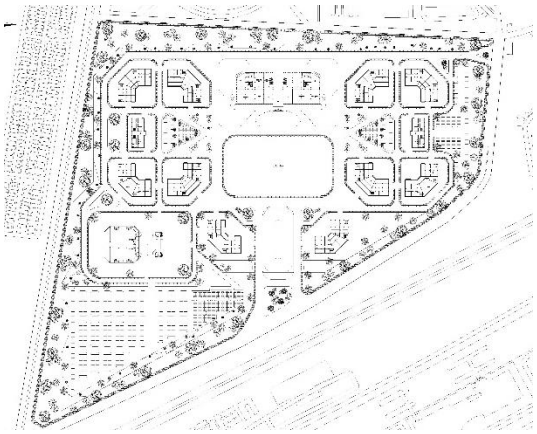
Konsep tata massa kawasan menerapkan prinsip centralized government complex, yaitu menempatkan bangunan Kantor Gubernur sebagai pusat orientasi kawasan. Bangunan dinas dan fasilitas pemerintahan lainnya disusun secara simetris mengelilingi bangunan utama sehingga membentuk hierarki yang jelas. Pola ini memperkuat citra kawasan pemerintahan sekaligus mempermudah koordinasi antarinstansi.



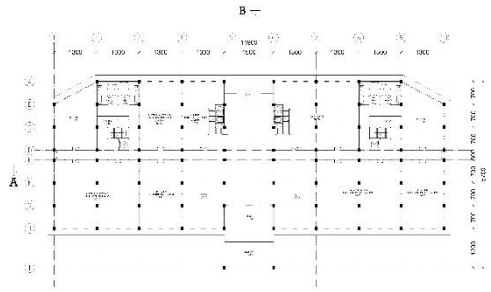
Gambar 7. Tata massa kawasan
Sumber : Analisis Penulis, 2026



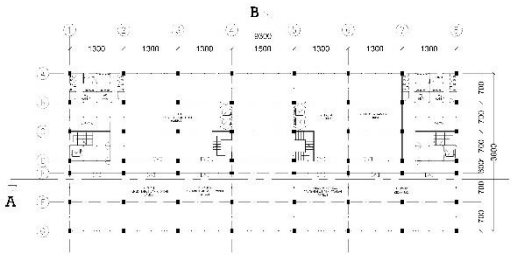
Gambar 8. Siteplan
Sumber : Analisis Penulis, 2026



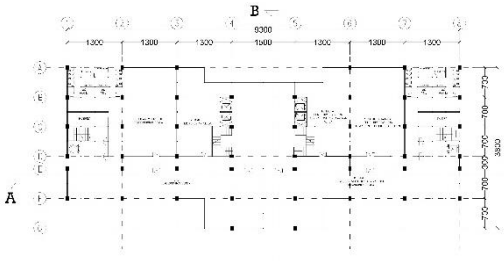
Gambar 9. Siteplan
Sumber : Analisis Penulis, 2026



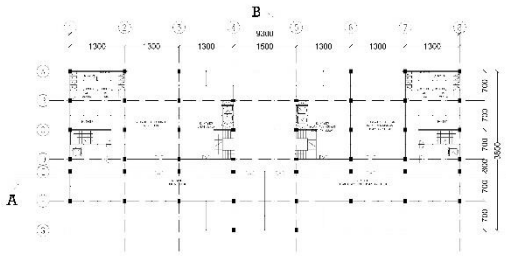
Gambar 10. Denah Kantor Gubernur lt.1
Sumber : Analisis Penulis, 2026



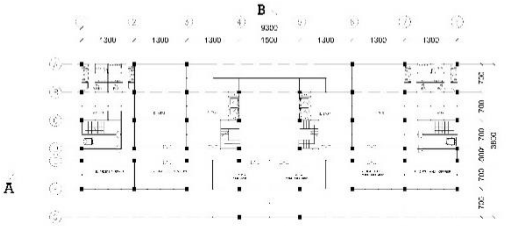
Gambar 11. Denah Kantor Gubernur lt.2
Sumber : Analisis Penulis, 2026



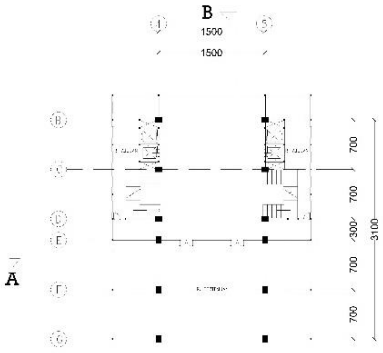
Gambar 12. Denah Kantor Gubernur lt.3
Sumber : Analisis Penulis, 2026



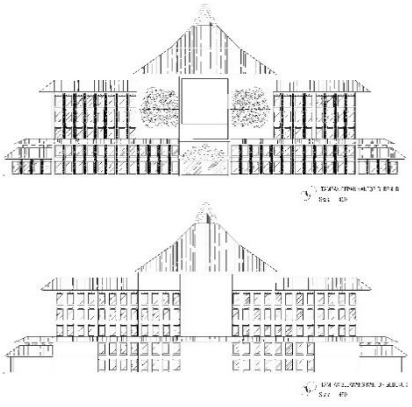
Gambar 13. Denah Kantor Gubernur lt.4
Sumber: Analisis pribadi



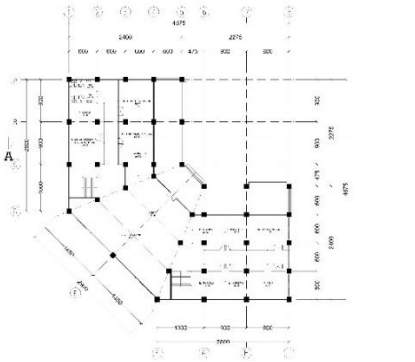
Gambar 14. Denah Kantor Gubernur lt.5
Sumber : Analisis Penulis, 2026



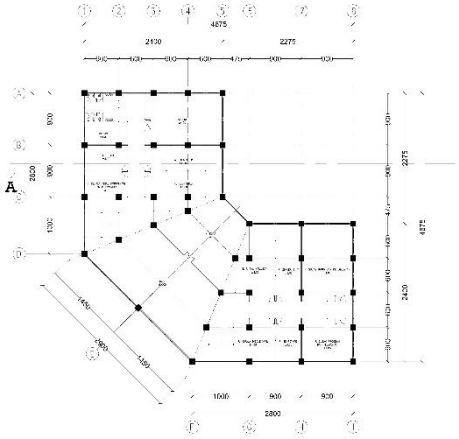
Gambar 15 Denah Kantor Gubernur lt.6
Sumber : Analisis Penulis, 2026



Gambar 16 Tampak Depan Kantor Gubernur
Sumber : Analisis Penulis, 2026



Gambar 17 Denah Kantor Dinas lt.1
Sumber: Analisis pribadi



Gambar 18 Denah Kantor Dinas lt.2
Sumber : Analisis Penulis, 2026



Gambar 19 Tampak Kantor Dinas
Sumber : Analisis Penulis, 2026

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pendekatan Neo-Vernakular pada kawasan pemerintahan dapat dikembangkan tidak hanya sebagai strategi pembentukan identitas visual bangunan, tetapi sebagai strategi perancangan kawasan yang mengintegrasikan aspek fungsi, ruang, budaya, dan lingkungan. Melalui konsep **"Puseur Nagara yang Someah"**, pusat pemerintahan diposisikan sebagai orientasi utama kawasan sekaligus sebagai ruang yang memiliki karakter terbuka, humanis, dan merepresentasikan nilai budaya Sunda. Temuan tersebut menghasilkan empat strategi desain utama, yaitu (1) integrasi tata massa pemerintahan melalui prinsip *centralized government complex*, (2) pembentukan hierarki ruang berdasarkan tingkat akses dan privasi, (3) transformasi nilai dan elemen arsitektur Sunda melalui reinterpretasi Julang Ngapak dan Someah Hade Ka Semah, serta (4) penerapan strategi responsif terhadap iklim tropis dan karakter lingkungan tapak.

Kontribusi akademik penelitian terletak pada perumusan hubungan antara identitas budaya Sunda dengan sistem spasial kawasan pemerintahan modern. Konsep Puseur Nagara yang Someah tidak ditempatkan sebagai simbol atau tema visual semata, tetapi diterjemahkan menjadi prinsip pengorganisasian ruang, tata massa, hubungan antarbangunan, ruang publik, serta karakter bangunan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa identitas budaya dapat berfungsi sebagai dasar konseptual dalam membentuk struktur kawasan, bukan hanya sebagai elemen dekoratif.

Terhadap pengembangan teori Arsitektur Neo-Vernakular, penelitian ini memberikan kontribusi berupa perluasan penerapan Neo-Vernakular dari skala bangunan menuju strategi desain pada skala kawasan pemerintahan. Transformasi budaya dilakukan melalui tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu reinterpretasi nilai budaya, transformasi elemen arsitektur, dan adaptasi prinsip lingkungan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Neo-Vernakular dapat digunakan untuk mempertemukan tuntutan fungsi pemerintahan kontemporer dengan identitas lokal tanpa harus melakukan reproduksi bentuk tradisional secara literal.

Secara praktis, strategi yang dihasilkan dapat menjadi referensi awal bagi perancangan kawasan pemerintahan yang memiliki kebutuhan integrasi fungsi, hierarki akses, identitas daerah, dan respons terhadap iklim tropis. Penerapan

prinsip Puseur Nagara yang Someah dapat membantu membentuk kawasan pemerintahan yang memiliki orientasi dan hierarki yang jelas sekaligus menyediakan ruang publik yang lebih terbuka dan representatif bagi masyarakat. Dalam konteks Jawa Barat, strategi ini juga dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan untuk menghadirkan identitas arsitektur Sunda pada lingkungan pemerintahan modern

DAFTAR PUSTAKA

Agus Warsudi. (2023). *Konsep Atap Rumah Julang Ngapak*. https://jabar.inews.id/berita/cerita-tentang-konsep-atap-rumah-julang-ngapak-filosofi-dan-artinya

Ardiyansyah, A., Suryantoro, D. N., Sutrisna, P., Sekar, S., & Kadir, M. A. (2021). PENERAPAN FILOSOFI SUNDA "SOMÉAH HADÉ KA SÉMAH" DALAM INTERAKSI VIRTUAL. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2).

BBC NEWS INDONESIA. (2019, September 2). *Pusat Pemerintahan Jawa Barat dipindah dari Bandung*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49547101

Bima Baskara. (2023, October 7). *Apa Kabar Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar?* https://www.detik.com/jabar/berita/d-6970033/apa-kabar-wacana-pemindahan pusat-pemerintahan-jabar

Dhani. (2020). *Filosofi Bentuk Atap Julang Ngapak*.

Fajrine, G., Purnomo, A. B., Juwana, J. S., Mahasiswa,), & Arsitektur, J. (2017). Penerapan Konsep ArsitekturNeo Vernakular. In *Seminar Nasional Cendekiawan ke* (Vol. 3).

Lintong, P., Kumurur, V. A., & Mastutie, F. (2019). *PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR PADA KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU*.

R Jeremiah. (2024). *BAB II KAJIAN TEORI 2.1. Arsitektur Neo-Vernakular 2.1.1. Pengertian*.

Suharso, & Ibid. (2020). *BAB 1*.

Yudha, A. E. P., & Setiyowati, E. (2022). Studi Gedung Sate dan Gasibu, Bandung. *Journal of Islamic Architecture*, *4*(1), 37. https://doi.org/10.18860/jia.v4i1.3466